

HIERARKI PUSAT PELAYANAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT DAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

by Puji Hardati

Submission date: 26-Jun-2020 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1349893100

File name: RARKI_PUSAT_PELAYANAN_DI_KECAMATAN_UNGARAN_BARAT_DAN_UNGARAN.pdf
(890.56K)

Word count: 3997

Character count: 25416



Jurnal Geografi

Media Infromasi Pengembangan Ilmu dan
Profesi Kegeografian



IERARKI PUSAT PELAYANAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT DAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Puji Hardati

Staf Pengajar Jurusan Geografi, FIS Unnes

Email: datie58@yahoo.com

Sejarah Artikel

Diterima: Mei 2016

Disetujui: Juni 2016

Dipublikasikan: Juli 2016

Abstract

The study aims to identify the hierarchy of service centers. The unit of analysis is the village/ward in subdistricts of West and East Ungaran. The variables used were the infrastructure and facilities in 21 villages/wards. Descriptive analysis using percentages, tables, and indexes. In Subdistrict East Ungaran all villages/wards into the hierarchy of three, with the highest index value in the ward Kalirejo, while in the Subdistrict of West Ungaran, there are two villages included in the hierarchy of the two, with the highest index value in the ward Bandarjo. West Ungaran subdistrict is a region having a population of at most and highest density. Village of Bandarjo into a service center activities of the population. Its territory is near the highway Semarang-Surakarta/Yogyakarta, have hight accessibility.

Keyword: *hierararchy , service centers , social , economic , population activities*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan. Unit analisis adalah desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Timur. Variabel yang digunakan adalah prasarana dan sarana di 21 desa/kelurahan di dua kecamatan. Analisis menggunakan diskriptif persentase, tabel, dan indek. Di Kecamatan Ungaran Timur, semua desa/kelurahan masuk dalam hierarki tiga, dengan nilai indek paling tinggi di Kelurahan Kalirejo, sedangkan di Kecamatan Ungaran Barat, terdapat dua kelurahan masuk dalam hierarki dua, dengan nilai indek paling tinggi di Kelurahan Bandarjo. Kecamatan Ungaran Barat adalah wilayah memiliki jumlah penduduk paling banyak, dan kepadatan paling tinggi. Kelurahan Bandarjo menjadi pusat pelayanan kegiatan penduduk. Wilayahnya berada di dekat jalan raya Semarang-Surakarta/Yogyakarta, memiliki aksesibilitas tinggi.

Kata Kunci: hierarki, pusat pelayanan, sosial, ekonomi, aktivitas penduduk

© 2016 Universitas Negeri Semarang

▪ Alamat Korespondensi :
Gedung C1 Lantai 1 FIS UNNES
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail : geografiunnes@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Wilayah merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya. Hal tersebut mendasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan tertentu, baik dari aspek pendekatan perencanaan ataupun batasan administrasi. Daerah adalah wilayah menurut batasan ruang lingkup kewenangan administratif, sedangkan pengertian ruang adalah wujud wilayah baik diabstraksikan dalam dimensi fisik geografis sebagai wadah kegiatan manusia atau yang bersifat alamiah maupun dalam dimensi ekonomi yang dicerminkan oleh hubungan elemen-elemen ekonomi. Mulyanto (2008), mengemukakan ruang adalah bentangan geografis dengan batas yang jelas dengan infrastruktur didalamnya dan udara di atasnya sesuai yang diakui secara hukum yang berlaku. Wilayah (RI, 2006) adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional.

Pembagian wilayah (Suharyono, 2005; Tarigan, 2009; Muta'ali, 2011), dikelompokkan atas beberapa kriteria yaitu, (1) homogenitas; wilayah dapat diberi batas berdasarkan beberapa persamaan unsur tertentu seperti unsur ekonomi wilayah, yaitu pendapatan perkapita. Kelompok industri maju, tingkat pengangguran, keadilan sosial politik, atau identitas wilayah berdasarkan sejarah,

budaya, dan sebagainya. (2) Nodalitas; yang menekankan pada perbedaan struktur, tataruang di dalam wilayah dimana terdapat sifat ketergantungan fungsional baik dibidang ekonomi maupun pelayanan sosial. Dalam hal ini suatu wilayah, batas ditetapkan berdasarkan pengaruh suatu pusat (kota) terhadap wilayah sekitarnya. (3) Adminsitrasi atau Unit Program; penentuan wilayah berdasarkan perlakuan kebijaksanaan yang seragam, seperti sistem dan tingkat pajak yang sama dan lain sebagainya.

Klasifikasi wilayah (Suharyono, 2005) dibedakan atas : (1) wilayah formal dan (2) wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Pada mulanya, klasifikasi wilayah formal didasarkan atas persamaan fisik, seperti topografi, iklim atau vegetasi, kemudian berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi, seperti adanya wilayah industri dan wilayah pertanian bahkan mempergunakan kriteria sosial politik. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah polarisasi dan terdiri atas unit-unit yang heterogen seperti kota besar, kota-kota kecil dan desa-desa yang secara fungsional saling tergantung. Kombinasi wilayah formal dan fungsional, sebagai klasifikasi ketiga, merupakan wilayah

perencanaan. Untuk wilayah perencanaan, beberapa hal harus diperhatikan, antara lain suatu wilayah harus cukup luas untuk memenuhi kriteria investasi dalam skala ekonomi, harus mampu menunjang industri dengan pengadaan tenaga kerja, persamaan ekonomi, mempunyai paling tidak satu kota sebagai titik tumbuh dan strategi pembangunan yang sama untuk memecahkan masalah yang sama.

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk menjangkau. Bintarto dan Surastopo (1979) memberikan pengertian aksesibilitas sebagai kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah. Oleh karena itu aksesibilitas erat kaitannya dengan jarak dan potensi manusia dalam mendapatkan pelayanan yang ada. Johnston (1981) memberikan pengertian aksesibilitas sebagai kemungkinan mudah terjangkau, untuk dapat menjangkau dibutuhkan kemampuan (*ability*). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa aksesibilitas dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi geometrik yang berhubungan dengan jarak, dan dimensi sosial ekonomi yang lebih menekankan pada kemampuan individu dalam mencapai pelayanan yang diinginkan. Pacione (1984) menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dibedakan menjadi dua yakni aksesibilitas fisik atau aksesibilitas lokasional yang sangat erat kaitannya dengan unsur jarak dan sarana-prasarana transportasi, dan aksesibilitas sosial

atau personal yang berhubungan dengan kemampuan atau potensi individu untuk mencapai pelayanan. Potensi yang dimaksud adalah potensi sosial ekonomi seperti pendapatan, struktur keluarga, dan tingkat pendidikan individu. Dengan demikian aksesibilitas sangat erat kaitannya dengan potensi manusia dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Dimensi ukuran jarak yang dikemukakan meliputi jarak fisik atau geometrik yang diukur dengan satuan jarak, yaitu jarak waktu atau *time distance*, yang diukur dengan satuan waktu yaitu jam, jarak ekonomi atau *cost distance* yang diukur dengan besarnya ongkos atau biaya dalam rupiah yang diperlukan untuk memindahkan orang lain.

Distribusi dan fasilitas pelayanan, sebagai fungsi tata ruang wilayah dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, pencapaian pemerataan sosial ekonomi dan kualitas hidup. Keberadaan fasilitas pelayanan yang meliputi lokasi, kualitas, kuantitas, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Padangarang (2008) pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik apabila fasilitas pelayanan tidak tersedia dengan baik. Fasilitas pelayanan menjadi faktor potensial dalam menentukan masa depan dan perkembangan suatu wilayah baik di perkotaan dan perdesaan.

Fasilitas menjadi sangat penting karena keberadaannya dapat mempengaruhi pembangunan kembali suatu wilayah dari keadaan yang terburuk. Penyediaan fasilitas sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan di suatu wilayah, baik di pusat maupun di pinggiran, bahkan dapat dikatakan sebagai masalah nasional. Kualitas infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara tersebut Kodoatie (2005). Ketimpangan pertumbuhan antara kelompok kaya dan miskin di bangsa-bangsa sedang berkembang ditandai secara luas pada perbedaan dalam akses terhadap aktivitas produktif dan jasa sosial ekonommi (Bank Dunia dalam Rondinelli, 1985). Selain itu, dari perspektif umum, fasilitas direncanakan untuk meningkatkan kualitas suatu wilayah. Chapin (1995) menjelaskan bahwa tanpa adanya penyediaan fasilitas sosial ekonomi pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya.

Di Indonesia, sejak tahun 1960 sampai sekarang jumlah penduduk semakin meningkat tajam, dari 91 juta pada tahun 1961 menjadi 235 juta jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk yang semakin meningkat juga dibarengi dengan pertumbuhan yang tinggi. walaupun dalam periode terkahir ini sudah

menunjukkan penurunan, tetapi secara absolut pertambahannya masih termasuk tinggi. Keadaan demikian terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu propinsi di dengan jumlah penduduk sekitar 33 juta jiwa pada tahun 2010, dan pada tahun 2015 menjadi 35 juta jiwa (BPS, 2011, BPS, 2016).

Pertambahan jumlah penduduk seharusnya diikuti dengan pertambahan fasilitas pendukung, karena ketersediaan fasilitas menentukan tingkat perkembangan wilayah. Hierarki pusat pelayanan penting dan relevan untuk dikaji dan menjadi focus dalam penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah, dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan di suatu wilayah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian wilayah, dengan unit analisis desa, sehingga populasinya adalah sejumlah desa yang ada di dua kecamatan tersebut, yaitu 11 desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat dan 10 desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur. 21 desa tersebut dijadikan obyek penelitian, responden dalam penelitian ini adalah dinas/instansi terkait. Tokoh masyarakat dijadikan informan kunci apabila segenap informasi yang diperlukan belum lengkap.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, fasilitas sosial, ekonomi, dan pendukung di 21 desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Menggunakan data sekunder, yang sumber data dari dinas/instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum. Pengumpulan data dengan dokumentasi. Observasi dan pengukuran, serta wawancara.

Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan interpretatif. Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci setiap variabel penelitian. Metode indeksing digunakan dengan pertimbangan, dapat dipakai untuk menentukan hirarki pusat pengembangan dan sarana pembangunan serta beberapa fasilitas pelayanan di setiap desa. Metode ini memberikan hirarki atau peringkat yang lebih tinggi kepada pusat pengembangan yang memiliki jumlah jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan yang paling banyak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Daerah Penelitian

Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur terletak antara $7^{\circ}4'50''$ – $7^{\circ}6'25''$ LS dan

$110^{\circ}21'52''$ – $110^{\circ}25'17''$ BT dan Kecamatan Ungaran Timur terletak antara $7^{\circ}4'50''$ – $7^{\circ}10'25''$ LS dan $110^{\circ}25'17''$ – $110^{\circ}29'55''$ BT.

Batas administrasi Kecamatan Ungaran Barat sebelah Barat adalah Kota Semarang, sebelah Timur Kecamatan Ungaran Timur, Sebelah Utara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Batas administrasi Kecamatan Ungaran Timur, sebelah Barat Kecamatan Ungaran Barat, sebelah Timur Kabupaten Demak, sebelah Utara Kota Semarang, dan sebelah Selatan Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus (BPS, 2015).

Morfologi wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur memiliki kondisi topografi bergelombang sangat kasar, dan berbukit-bukit, yaitu di bagian barat dan bagian timur. Dari 21 desa/kelurahan berada pada kelayaian antara 0 – 45 %, hanya di beberapa desa yang topografinya landai. ketinggian rata-rata 375 mdpl (meter diatas permukaan laut). Wilayahnya meliputi kelas lereng 1 sampai 5, dengan sudut lereng 0 sampai lebih dari 45 %. Klasifikasinya mulai datar hingga sangat curam.

Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur yang awalnya merupakan satu wilayah Kecamatan Ungaran, karena perkembangannya sangat pesat, baik perkembangan jumlah penduduk maupun perkembangan fasilitas pendukungnya, dan sekarang letaknya dibelah oleh jalur jalan raya Semarang-

Surakarta/Jogyakarta. Sebelah Timur jalan raya wilayah Kecamatan Ungaran Timur dan sebelah Barat wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Walaupun ada sebagian desa/kelurahan yang di sebelah Barat jalan raya masuk ke wilayah Ungaran Timur, dan sebaliknya desa/kelurahan yang ada di sebelah Timur jalan raya masuk wilayah Kecamatan Ungaran Barat.

3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adiministrasi Kependudukan, pada pasal ayat (2) dijelaskan bahwa penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang di Kecamatan Ungaran Timur adalah 68.686 jiwa atau 7,36 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Semarang (BPS, 2011). Di kedua kecamatan tersebut, diprediksi pada tahun 2025 jumlah penduduknya mencapai 101.452 jiwa dan 115.750 jiwa (BPS, 2015).

Di Kecamatan Ungaran Barat, penduduk laki-laki 48, 73 persen dan 51,27 persen penduduk perempuan atau sex ratio sebesar 95,05. Tingkat kelahiran 16,23 dan tingkat kematian 6,19, angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,90. Di Kecamatan Ungaran Timur, penduduk laki-laki 49, 45 persen dan 50,55 persen penduduk perempuan atau sex ratio sebesar 97,86. Tingkat kelahiran 10,10 dan

bertempat tinggal di Indonesia. Penegrtian penduduk yang lain yang dikutip dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 dijelaskan bahwa orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Pada Tahun 2010, jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat adalah 74.481 jiwa atau 7,98 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Semarang, sedangkan jumlah penduduk

tingkat kematian 2,57, dan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,28. Jumlah penduduk yang datang mencapai 1,39 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, dan jumlah penduduk yang pergi 0,87 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Berarti perubahan jumlah penduduk didominasi oleh perubahan non alami.

Kepadatan penduduk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya atau jumlah penduduk setiap sauan unit wilayah. Kepadatan penduduk di Kecamatan Ungaran Barat lebih tinggi dibanding dengan di Kecamatan Ungaran Timur, yaitu 2071 jiwa per kilometer persegi dan 1808 jiwa per kilometer persegi, pada tahun 2010.

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Ungaran Tahun 2010 dan Ungaran Barat dan Ungaran Timur Tahun 2015

Komponen	Ungaran Barat	Ungaran Timur
Jumlah penduduk (jiwa)		
2010	74481	68686
2015	76945	69744
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
2010	2071	1808
2015	2139	1835

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

3.4 Hierarki Pusat Pelayanan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur

Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan. Fasilitas ekonomi meliputi pasar, toko, warung kelontong, mini market. Fasilitas finansial meliputi Bank, BPR, Koperasi. Fasilitas sarana transportasi meliputi jaringan jalan dan angkutan. Secara umum fasilitas yang ada di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur jumlahnya berbeda. Di Kecamatan Ungaran Barat

memiliki fasilitas lebih banyak dibanding dengan yang ada Kecamatan Ungaran Timur.

Di Kecamatan Ungaran Barat, keberadaan fasilitas pendidikan, Pasar, Toko, Warung, Mini Market, Kedai makan/Rumah Makan /Restoran, jumlahnya hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Ungaran Timur. Demikian juga dalam hal jumlah penduduk. Aksesibilitas Kecamatan Ungaran Barat lebih tinggi, dengan panjang jalan hampir dua kali panjang jalan yang ada di Kecamatan Ungaran Timur.

Tabel 2. Jenis Fasilitas Di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur

No	Jenis Fasilitas	Ungaran Barat	Ungaran Timur
1	Pendidikan	154	86
2	Kesehatan	171	129
3	Pasar, Toko, Warung, Mini Market	1128	560
4	Kedai makan/Rumah Makan /Restoran	238	131
5	Bank, Bank Perkreditan Rakyat, koperasi	55	15
6	Jaringan jalan	224	110,70
7	Jalan aspal	115,10	87,20

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur masuk dalam kelompok hierarki 3 dan 2. Hierarki 2 hanya di Kelurahan Langensari dan Bandarjo di Kecamatan Ungaran Barat. Desa/kelurahan lainnya masuk ke dalam kelompok hierarki 3. Desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur tidak ada yang masuk ke dalam kelompok hierarki 1 dan 2, semua desa/kelurahan masuk dalam kelompok hierarki 3. Kelurahan Bandarjo menjadi pusat pelayanan, sedangkan desa/kelurahan lain disekitarnya menjadi wilayah pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masih terpusat di beberapa kelurahan. Pembangunan yang diharapkan dapat terdistribusi ke seluruh wilayah kenyataannya belum terjadi.

Di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diikuti dengan nilai indek fasilitas dan hierarki pusat pelayanan yang meningkat. Di Kecamatan Ungaran Barat, jumlah penduduk paling banyak di Kelurahan Ungaran, sedangkan indek fasilitas tertinggi di kelurahan Bandarjo. Kelurahan Ungaran masuk dalam pusat pelayanan hierarki 3 dan Kelurahan Bandarjo masuk dalam pusat pelayanan hierarki 2. Di Kecamatan Ungaran Timur, jumlah penduduk paling banyak di kelurahan Gedanganak, sedangkan indek fasilitas tertinggi di Kelurahan Kalirejo. Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Gedanganak masuk dalam pusat pelayanan hierarki 3.

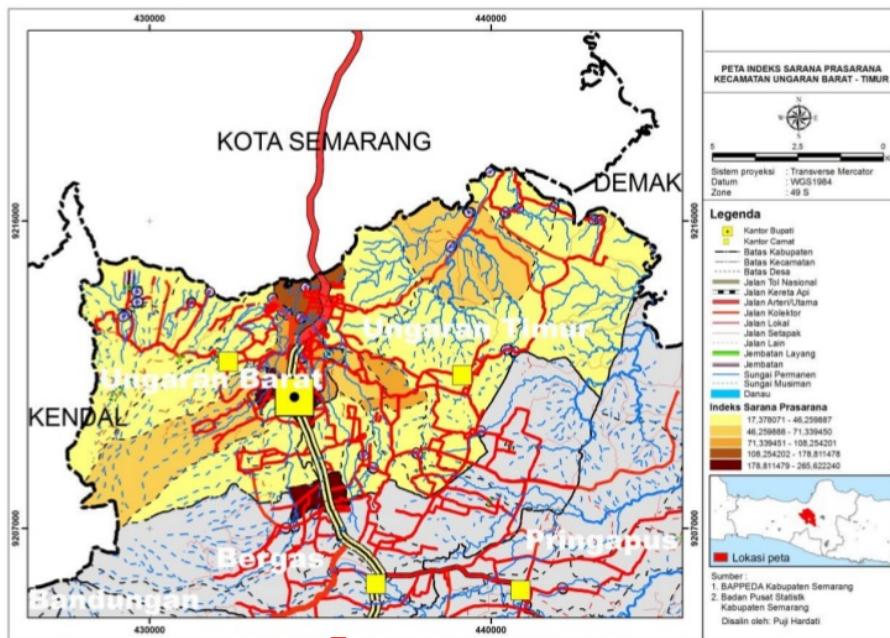
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Indeks Fasilitas di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Indek	Hierarki
1.	Gogik	3502	74	3
2.	Langensari	9535	194	2
3.	Candirejo	5671	79	3
4.	Nyatnyono	7721	90	3
5.	Genuk	8413	143	3
6.	Ungaran	11557	100	3
7.	Bandarjo	9064	252	2
8.	Lerep	10209	79	3
9.	Keji	2324	115	3
10.	Kalisidi	5800	87	3
11.	Branjang	3145	107	3
12.	Beji	8525	58	3
13.	Leyangan	7469	50	3
14.	Kalongan	9473	76	3
15.	Kawengen	6112	39	3
16.	Kalikayen	3525	82	3
17.	Mluweh	3915	116	3
18.	Susukan	8766	96	3
19.	Kalirejo	3893	121	3
20.	Sidomulyo	4024	104	3
21.	Gedanganak	14042	56	3

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Secara umum, berdasarkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur masuk dalam hierarki 3, yaitu hierarki muda. Hal ini disebabkan keberadaan fasilitas yang ada masih harus ditingkatkan terutama kuantitasnya. Fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah tidak sama, pada umumnya sangat tergantung dari fungsi wilayah. Di Kecamatan Ungaran Barat fasilitas lebih beragam dan lebih banyak atau lebih lengkap. Hal ini disebabkan Kecamatan Ungaran merupakan ibukota kabupaten, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Di Kecamatan Ungaran

Barat, tidak semua desa/kelurahan memiliki fasilitas sosial dan ekonomi yang sama, tetapi ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi sangat bervariasi. Ungaran merupakan salah satu kelurahan yang memiliki fasilitas paling banyak, selain itu kelurahan ini memiliki tingkat strategis yang paling tinggi, karena ditunjang dengan dimilikinya jalan aspal yang dapat dilalui oleh berbagai jenis dan kelas kendaraan bermotor. Selain itu jarak ke semua pusat pelayanan, baik pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan sosial juga paling dekat.



Gambar 1. Peta Heirarki Pusat Pelayanan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur

Kecamatan Ungaran Timur fasilitasnya masih belum sebanyak dan selengkap yang ada di Ungaran Barat, karena selain wilayah Ungaran Timur awalnya tergabung menjadi satu dengan Kecamatan Ungaran Barat dengan nama sebelumnya Kecamatan Ungaran, dan baru sekitar tahun 2005, ada pemekaran wilayah dan berdiri sendiri dengan 10 desa/kelurahan. Selain itu, Kecamatan Ungaran Timur juga tidak menjadi pusat kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten. Tetapi ke depan, beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur menjadi pilihan bermukim bagi penduduk (terutama penduduk pendatang) untuk bertempat tinggal, hal ini dapat dijelaskan dengan semakin banyaknya perumahan baru di wilayah kecamatan Ungaran Timur. Selain itu, wilayah Kecamatan Ungaran Timur dilintasi jalur jalan TOL Semarang-Solo, sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Sampai dengan tahun 2012 ini sudah banyak pengembang membuka real estate dan beberapa fasilitas sosial seperti pusat layanan kesehatan dan ekonomi, sehingga akan menjadi lebih berkembang.

Keberadaan fasilitas di Kecamatan Ungaran Barat, mendukung pendapat dikemukakan oleh Rondinelli (1993), Muta'ali (2003), bahwa setidaknya ada tujuh keuntungan penyebaran konsentrasi investasi yang berupa fasilitas, antara lain: adanya efek pemencaran (*spread effect*) dan skala ekonomi

dari pusat-pusat kepada daerah *hinterland*. Menata ekonomi perdesaan melalui mekanisme ekonomi, sistem administrasi, dan sistem pelayanan sehingga kerja dapat tercipta dan semakin beragam. Menciptakan iklim kondusif bagi lahirnya individu-individu yang kreatif dan inovatif. Terciptanya keunggulan komperatif dari pusat-pusat. Meningkatkan permintaan berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur baru sehingga pertumbuhan wilayah dapat terus dipacu. Menciptakan interaksi fisik-ekonomi antar berbagai permukiman dan akan meningkatkan aksesibilitas. Menarik aktivitas sosial-ekonomi yang berhubungan sehingga dapat membentuk pasar baru bagi berbagai komoditi wilayah.

Ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang ada di setiap wilayah juga akan memberikan gambaran terhadap aksesibilitas wilayahnya. Pada umumnya wilayah dengan fasilitas lebih lengkap dan baik berada pada wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi. Hal ini juga terjadi di kedua wilayah kecamatan ini. Di kecamatan Ungaran Barat yang memiliki indeks fasilitas lebih tinggi juga didukung dengan aksesibilitas wilayah yang lebih tinggi pula. Keadaan ini didukung dengan tingkat strategis suatu wilayah. Wilayah Kecamatan Ungaran Barat lebih strategis dibanding dengan wilayah Kecamatan Ungaran Timur. Walaupun di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur semua

desa/kelurahan memiliki skor hampir sama, tetapi di kedua wilayah kecamatan tersebut sama-sama masih memiliki desa/kelurahan yang tidak dapat dilalui angkutan umum.

4. KESIMPULAN

Di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur pertumbuhan penduduk termasuk tinggi, masing-masing adalah 3,31 persen dan 2,51 persen. Indeks fasilitas berkisar 74 – 252. Di Kecamatan Ungaran Barat, indeks fasilitas tertinggi ada di Kelurahan Bandarjo, dan di Kecamatan Ungaran Timur, indeks fasilitas tertinggi di Kelurahan Kalirejo. Pada desa/kelurahan dengan pertumbuhan penduduk tinggi tidak selalu diikuti dengan penambahan fasilitas sosial ekonomi. Desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur masuk kriteria pusat pelayanan hierarki 3, sedangkan desa/kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat masuk kriteria pusat pelayanan hierarki 2 dan 3. Kelurahan Bandarjo dan Kelurahan Langensari masuk dalam pusat pelayanan hierarki 2, memiliki aksesibilitas tinggi.

Fasilitas sosial ekonomi sebaiknya dibangun pada desa/kelurahan yang menjadi pusat kegiatan dan pusat tempat tinggal penduduk. Desa/kelurahan yang menjadi konsentrasi penduduk belum diikuti oleh banyaknya fasilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1976. *Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta. UD.Spring.
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta. LP3ES.
- Bunce, M. Pacione, michael. Ed. *The Evolution of The Settlement Pattern. Progress Rural Geography*. London and Canberra. Croom Helm.
- Daldjoeni, N. 1978. *Manusia Penghuni Bumi. Bunga Rampai Geografi Sosial*. Bandung. Alumni.
- Hammond, Charles Whyhne. 1979. *Elemens of Human Geography*. London. George Allen and Unwin.
- Hardati, P. 2012. Keterkaitan Antara Perkembangan Penduduk dengan Ketersediaan Fasilitas Wilayah di Kecamatan Ungaran Barat dan Timur Kabupaten Semarang. *Laporan Hasil Penelitian*. Unnes. Tidak dipublikasikan.
- Hardoyo, Su Rito. 2009. Statistik Terapan (Cara Membaca dan Interpretasinya). *Bahan Ajar*. Program Studi Geografi dan Program Studi Kependudukan Sekolah Pasca Sarjana UMG. Yogyakarta.
- Hardoyo, Su Rito. 2011. Penggunaan dan Tata Guna Lahan. *Bahan Kuliah*. Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
- Jayadinata, T, Johara. 1997. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB. Bandung.
- Johnston, R.J. 1981. *The Dictionary of Human Geography*. England. Brasil Blackwell Oxford.
- Kompas, 22 Desember, 2002.
- Kondoatie, R.J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. Jogyakarta.
- Moseley, Malcolm. 1979. *Accessibility: The rurual Challenge*. London. Methuen and Co Ltd.
- Muta'ali, Lutfi. 2011. *Kapita Seleka Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbitan Fakultas Geografi UGM. Jogyakarta.

- Muta'ali, Lutfi. 2003. Studi *Penentuan Desa-desda Pusat Pertumbuhan di Propinsi DIY*. Majalah Geografi Indonesia. Hal. 33-51. Vol. 17. Nomor 1, Maret 2003.
- Pacione, Michael. 1984. *Rural Geography*. London. Harper and Low Ltd.
- Padangarang. 2008. Teknik Analisis Kuantitatif Wilayah. Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pemerintah RI. Tidak dipublikasikan.
- Rijanta, R. 2006. Rural-Urban Linkages Non Formal Sectors and Farming Practices in Yogyakarta Special Region (DIY). Populasi. Hal. 75-87. Vol. 17. No. 1 Tahun 2006.
- Ritohardoyo, S. 2011. Statistik Terapan. Cara Membaca dan interpretasi Data. Bahan Kuliah. Fakultas Geografi UGM. Tidak dipublikasikan.
- Ritohardoyo, S. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Romziah S.B. 1996. Problem dan Implementasi Peledakan Penduduk Lansia Menjelang Tahun 2020. Populasi. Hal. 69-78. Vol. 7. Nomor. 2 Tahun 1996.
- Rondinelli, D.A. 1983. *Secondary Cities In Developing Countries Policius for Diffusing Urbanization*. SAGE Publishing Inc. London.
- Soemarwoto, Otto. 1986. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Suning. 2009. Identifikasi Sektor Ekonomi Basis (Unggulan) dan Hierarki Pusat Pelayanan Berdasarkan Tingkat kemampuan Fasilitas Dalam rangka Pengembangan Wilayah. *Jurnal Teknik Waktu*. Volume 07. Nomor 02-Juli 2009. ISSN: 1412-1887.
- Suharyono. 2005. *Dasar-dasar Kajian Geografi Regional*. UNNES Press. Semarang.
- Tarigan. R. 2006. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Tukiran. 2007. Depopulasi dan Konsentrasi Penduduk di Jawa Madura. *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*. PSKK UGM. Jogyakarta.
- UN. 1993. *Guidelines. For Rural Centre Planning*. UN. New York.
- USAID. 2012. *Population and Economic Development*. Washington DC USA.

IERARKI PUSAT PELAYANAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT DAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 15 words